

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Quran Karim*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia
- Adjie, Habib, 2007, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, PT. Refika Aditama, Surabaya.
- Adjie, Habib, 2014, Hukum Notaris Indonesia, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.
- Anand, Gharisham, 2014, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, Zifatama Publisher, Sidoarjo.
- Asikin, Zainal, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budiono, Herlin, 2013, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budiono, Herlin, 2012, Beberapa Catatan Mengenai Perkumpulan Dalam Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Darus, Hadi, Luthfan, 2017, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, FH UII Press, Yogyakarta.
- Djulaeka, Rahayu Devi, 2020, Metode Penelitian Hukum, Scopindo media pustaka, Surabaya.
- Gazali, Djoni S. dan Usman, Rachmadi, 2012, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno, Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
- Muchtar, Oemar, 2017, Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta, Airlangga University Press, Surabaya.
- Parapat, Miando, dkk, 2022, Hukum Kenotariatan Indonesia, Jilid 2, Media Sains Indonesia, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sinamo, Nomensen, 2014, Filsafat Hukum, Dilengkapi Dengan Materi Etika Profesi Hukum, Permata Aksara, Jakarta.

Subekti dan Hendricus, 2012, Badan Usaha, Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta-aktanya, Cakrawala Media, Yogyakarta.

Sulistiyowati, 2020, Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan, Budi Utama, Yogyakarta.

Tanjung, Fahmi, 2019, Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban, Media Sahabat Cendekia, Surabaya.

Yudha, Agus, 2009, Hukum Pejanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial), Cetakan ke 4, Kencana, Surabaya.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Staatsblad 1870-64 tentang Kedudukan Badan Hukum dari Perkumpulan (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*)

Staatsblad 1939-570 jo 717 tentang Perkumpulan Indonesia (*Inlandsche Vereeniging*).

Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Republik Indonesia No 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

UU Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2016 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesaharan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan.

Kode Etik Notaris 2015.

## **C. Jurnal**

- Denny Saputra, 2017, Prinsip Kehati-hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahari Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik, Jurnal Akta, Volume.4 Nomor 3.
- Diah Imaniah, Ngadino, Mujiono Hafidh Prasetyo, 2020, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, Jurnal Notarius, Volume.13 Nomor 1.
- Fikri Ariesta, 2018, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap, Jurnal Lex Renaissance, Volume.3 Nomor 2.
- I.B.P. Manuaba, 2018, Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik, Jurnal Acta Comitatus, Volume.3 Nomor 1.
- Suhartati, 2020, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pembuatan Akta Otentik Pada Kantor Notaris Kabupaten Gowa, Jurnal Petitum, Volume 8, Nomor 2.

**D. Narasumber**

- Bagus Nugraha, SH, MKn, Notaris Wilayah Kerja Jakarta Selatan
- Emmyra Fausia Kariana, SH, MKn, Notaris Wilayah Jakarta Selatan.
- Vivi Novita R, SH, MKn, Notaris Wilayah Kerja Jakarta Selatan.
- Yosril. A, SH, MKn, Notaris Wilayah Kerja Jakarta Selatan.